BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan atas peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu di Indonesia diatur dalam undang-undang khusus (*lex specialist*). Secara umum perbuatan tindak pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu dan tata cara penyelesaiannya mengacu kepada KUHAP. Karena menganut asas *lex specialist derogate lex generali*, maka aturan dalam undang-undang pemilu lebih utama. Ketentuan Undang-undang pemilu mengatur tentang *in absentia* namun tidak terdapat aturan yang tegas (kekaburan hukum) mengenai *in absentia* yang mengatur dan bersifat mengikat seorang terdakwa pada proses penanganan tindak pidana pemilu.
2. Kebijakan hukum acara pidana terhadap peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu di Indonesia memungkinkan pengadilan untuk mempercepat proses peradilan dan mencegah penyimpangan dalam proses hukum. Penundaan persidangan bisa sangat mempengaruhi kasus, terutama jika alat bukti dan barang bukti tidak dapat mendukung pembuktian perkara. Di sisi lain, kebijakan peradilan *in absentia* dapat membahayakan hak-hak tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, pengadilan harus memberikan kesempatan yang adil bagi tersangka atau terdakwa untuk menyampaikan pembelaan mereka, bahkan jika mereka tidak hadir di persidangan.

B. Saran

Tentang peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia, saran penulis sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah dan DPR RI melakukan revisi undang-undang tentang pemilihan umum, terutama berkaitan dengan ketentuan *in absentia* dalam hal penanganan tindak pidana pemilihan umum dengan tahapan kebijakan formulasi aturan tentang peradilan *in absentia* yang jelas dan terperinci.
2. Terhadap kebijakan hukum acara pidana atas peradilan *in absentia* dalam tindak pidana pemilu di Indonesia, maka disarankan kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang menangani perkara tindak pidana pemilihan umum menjunjung profesionalitas sehingga dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Masyarakat dan hendaknya diadakannya hukuman tambahan dalam tuntutan Jaksa mengenai pencabutan penetapan calon peserta pemilu (diskualifikasi) yang telah melakukan tindak pidana pemilihan umum.